

TESIS

**GOVERNANCE NETWORK DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh

**LELI HERLIANTI
E012202004**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**GOVERNANCE NETWORK DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Program Magister Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh

**LELI HERLIANTI
E012202004**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

GOVERNANCE NETWORK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

LELI HERLIANTI

E012202004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **16 Agustus 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. M. Thahir Haning, M.Si.
Nip. 195705071984031001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si.
Nip. 196409181988032010

Ketua Program Studi
Administrasi Publik,

Susanti, M.Si
503111991032001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 197508182008011008



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leli Herlianti

Nomor Pokok Mahasiswa : E012202004

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya sendiri. Bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran dari orang lain. Apabila ditemukan atau terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 September 2024

Yang menyatakan



LELI HERLIANTI



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pemberi segala nikmat dan kehidupan atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan judul **“Governance Network dalam Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulukumba”** . Penulis berharap kiranya karya ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penuntut dan pengembangan ilmu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tesis ini, akan tetapi penulis telah berusaha maksimal untuk menyelesaikan tesis ini. Sekiranya ada saran dan kritik mengenai tesis ini, penulis menerima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan tesis ini banyak pihak yang membantu memberikan dukungan dan motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Phil Sukri Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Ibu Dr, Gita Susanti selaku Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin



4. Bapak Prof. Dr. Moh. Thahir Haning. M.Si, selaku pembimbing I
Terima kasih atas arahan, bimbingan, waktu, saran dan kritik yang diberikan sampai akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Indrayati Nur Indar, M. Si selaku pembimbing II terima kasih atas arahan, wejangan, bimbingan, waktu, saran dan kritik yang diberikan.
6. Kepada tim penguji Bapak, Prof. Dr Alwi, M.Si, Bapak Dr. Suryadi Lambali, M.Si , Ibu Dr. Syahribulan, M.Si, dan Bapak Dr. Nurdin Nara, M. Si Terima kasih telah menyempatkan waktu dan memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Lampe dan Ibu Nuraeni yang sangat saya sayangi yang telah begitu banyak mencurahkan kasih sayang, mendidik, dan mendoakan anaknya tanpa henti, terima kasih telah mendukung penuh segala proses pendidikan yang anaknya tempuh.
8. Kakak laki laki saya satu satunya, Jamaluddin, terimakasih selama ini telah dididik dengan keras, terimakasih sudah menjadi teman berkelahi sejak kecil, terima kasih untuk semua keinginan yang dipenuhi, terima kasih karna selalu dijaga hingga sebesar ini.
9. Kakak ipar saya satu satunya, Kak Niar, terima kasih sudah sangat baik selama ini, terima kasih sudah jadi teman bercerita, terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan.



Keponakan saya satu-satunya, terima kasih anak ganteng selalu hibur yeye, jadi anak sholeh, insyaallah kebanggaan orangtua.

11. Kepada Utami Ningsih Darwis, teman kos berbagi cerita, terima kasih untuk semua hal baik yang dilakukan, semangat untuk bisa menyelesaikan studi diantara banyaknya masalah.
12. Kepada Indah Cahyani, Muhammad Yusuf, dan Kak Rauf, teman teman magister, terima kasih untuk semua waktu yang dilewati bersama, terima kasih karena sudah sangat baik kepada penulis.
13. Kepada Lisa Ayu Lestari, Sahabat penulis yang selalu berbagi suka dan duka, terima kasih banyak karena selalu ada di waktu terburuk penulis.
14. Kepada Ayu Puspita Sari, Sahabat penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti hentinya.
15. Kepada Asmita Andriani, Sahabat kecil penulis, terima kasih selalu menemani penulis.
16. Kepada adik sekamar di rumah mutiara, Fitri dan ayu, terimakasih sudah berbagi tawa.
17. Rekan rekan mahasiswa magister administrasi publik Universitas Hasanuddin angkatan 2021.
18. Staf dan pengelola bagian akademik pasca dan jurusan dalam memberikan pelayanan yang baik untuk mengurus keperluan berkas penyelesaian studi ini.
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu



Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga dengan selesainya pendidikan pada jenjang ini dapat memberi konstribusi positif bagi masyarakat dan semoga setelah ini bisa melanjutkan ke jengjang berikutnya, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan serta semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamiin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu



ABSTRACT

LELI HERLIANTI, Governance Network in the Implementation of the Stunting Reduction Acceleration Program in Bulukumba Regency. (supervised by Moh. Thahir Haning, Nur Indrayati Nur Indar)

This study aims to explain the pattern of relationships between actors in the network in the policy of accelerating stunting reduction in Bulukumba Regency.

This study uses a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, document studies, and observations. Data were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study showed that in the Bulukumba Regency Stunting Reduction Acceleration Team, the core members consisted of Bappelitbangda, the Health Office, the Population Control Office, Family Planning, Women's Protection and Child Protection, and the Village Community Empowerment Office. Meanwhile, in the Bulukumba Regency Stunting Reduction Acceleration Team, the periphery members include the Ministry of Religion, Education Office, Usaid Madani, Foster Parents, etc. who have limited budget and depend on core members. Analysis of the quality of interaction between actors with the concept of embeddedness (attachment) which shows that the embeddedness that is formed is a structural embeddedness where trust between teams is constrained by the lack of openness. The frequency of interaction between actors is regular in accordance with the agreement, and the norms regulated in the joint agreement stated in the MOU.

Keywords: Governance network, Program, Acceleration of Stunting Reduction, Embeddedness, core-periphery



ABSTRAK

LELI HERLIANTI, Governance Network dalam Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulukumba. (dibimbing oleh Moh. Thahir Haning, Nur Indrayati Nur Indar)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antar aktor dalam jaringan pada kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten Bulukumba yang menjadi anggota core (inti) terdiri atas Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten Bulukumba yang menjadi anggota periphery (pinggiran) diantaranya Kementerian agama, Dinas Pendidikan, Usaid madani, Bapak Asuh, dll yang memiliki keterbatasan baik anggaran dan bergantung pada anggota inti (core). Analisis kualitas interaksi antara aktor dengan konsep embeddedness (keterlekatan) yang menunjukkan bahwa keterlekatan yang terjalin adalah keterlekatan struktural dimana kepercayaan antar tim terdapat kendala yaitu kurangnya keterbukaan. Frekuensi interaksi antar aktor teratur sesuai dengan kesepakatan, dan norma yang diatur dalam kesepakatan bersama yang tertuang dalam MOU.

Kata Kunci : *Governance network*, Program, Percepatan Penurunan stunting, Keterlekatan, inti-pinggiran



DAFTAR ISI

Sampul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan Keaslian	iii
Prakata	iii
Abstrack	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II Tinjauan Pustaka	12
2.1 Governance	12
2.1.1 Pengertian <i>Governance</i>	12
2.1.2 Dimensi <i>Governance</i>	13
2.2 <i>Governance Network</i>	16
2.3 <i>Governance Network in politic</i>	19
2.3.1 Pola Hubungan jaringan	21
2.3.1.1 Identifikasi aktor kunci (Core-Periphery)	21
2.3.1.2 Kualitas Interaksi (Embeddedness)	22
<i>Stunting</i>	25



2.4.1	Pengertian <i>Stunting</i>	25
2.4.2	Penyebab <i>Stunting</i>	26
2.4.3	Dampak <i>Stunting</i>	27
2.4.4	Intervensi Penurunan <i>Stunting</i>	27
2.4.5	Dasar Hukum Intervensi penurunan <i>stunting</i>	28
2.4.6	Lima Pilar pencegahan <i>Stunting</i>	28
2.4.7	Delapan Aksi Intervensi Penurunan <i>Stunting</i>	29
2.5	Penelitian Terdahulu	40
2.6	Kerangka Pikir	44
BAB III Metode Penelitian		45
3.1	Pendekatan Penelitian	45
3.2	Lokasi Penelitian	45
3.3	Fokus Penelitian	45
3.4	Jenis dan Sumber data	46
3.4.1	Data Primer	46
3.4.2	Data Sekunder	46
3.5	Informan Penelitian	47
3.6	Teknik Pengumpulan Data	48
3.7	Teknik Analisis Data	49
BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian		53
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba	53
4.1.2	Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba	55
4.1.3	Gambaran Umum Dinas Kesehatan Bulukumba	57
1.4	Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba	71



BAB V Hasil dan Pembahasan	87
5.1 Pola hubungan jaringan dalam kebijakan percepatan penurunan stunting.....	87
5.1.1 Identifikasi Aktor	87
5.1.2 Kualitas interaksi Jaringan	97
5.1.2.1 Kepercayaan	98
5.1.2.2 Frekuensi	101
5.1.2.3 Norma	105
BAB VI Penutup	119
5.1.1 Kesimpulan	119
5.1.2 Saran	120
Daftar Pustaka	121
Lampiran.....	125



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Prevalensi Stunting Di indonesia	3
Tabel I.2	Prevalensi Stunting Di Kabupaten Bulukumba.....	6
Tabel I.3	Jumlah Balita Stunting Di Kabupaten Bulukumba.....	7
Tabel II.1	Defenisi Jaringan	18
Tabel II.2	Komparasi Penelitian terdahulu dengan tesis	43
Tabel IV.1	luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba	53
Tabel IV.2	Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba	55
Tabel V.1	Peran Aktor dalam kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulukumba	93
Tabel V.2	Kegiatan Kerjasama dalam Rembuk stunting	104
Tabel V.3	Lokus stunting Desa/ Kelurahan di Bulukumba	106
Tabel V.3	Prevalensi stunting di kabupaten Bulukumba	107
Tabel V.4	Kegiatan Penurunan stunting	108
Tabel V.5	Realisasi anggaran stunting	117
Tabel V.6	Program atau kegiatan stunting yang tidak terealisasi.....	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1; Kerangka Pikir.....	44
Gambar IV.1; Peta Kabupaten bulukumba	53
Gambar V.1 Struktur Tim Percepatan penurunan stunting Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	89
Gambar V.2 Grup Whatsapp Tim Percepatan Penurunan Stunting....	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian terbaru dalam administrasi publik yang mengedapankan prinsip *governance* dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa pemerintah belum mampu menunjukkan performa yang optimal. *Governance* merupakan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses penentuan dan implementasi kebijakan publik (Alwi, 2018). Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. *Governance* juga merupakan konsep sosial yang melibatkan pelaku-pelaku untuk mengakselerasikan kepentingan publik secara lebih adil dan menebarnya peran lebih merata sesuai dengan realitas pluralitas kepentingan dan aktor yang ada. *Governance* juga dipahami sebagai bentuk kolaborasi sektor publik yang menitik beratkan pada pemerintah dengan jejaring (*government by network*) sebagai bentuk baru pemerintahan sektor publik.

Governance network adalah jaringan atau hubungan kerjasama antara pemerintah dengan instansi lainnya bersifat horizontal atau vertikal yang memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi masalah-masalah *Governance Network* juga dipahami sebagai bentuk pemerintahan eraktif dengan potensi menyatukan beragam aktor yang otonom



dan saling tergantung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif dan komprehensif. Munculnya konsep *governance network* sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik dan pembangunan sumber daya. Dimitris Christopoulos berpendapat bahwa *governance network* mengacu pada interaksi dan koordinasi antara berbagai kelompok kepentingan yang membentuk domain politik (Christopoulos, 2017)

Dimitris mengungkapkan bahwa jaringan dapat dilihat sebagai kausal untuk hasil politik atau sebagai hasil dari proses politik. Melihat jaringan sebagai kausal untuk hasil politik berarti bahwa interaksi dan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam jaringan tersebut secara langsung mempengaruhi hasil akhir dari proses politik. Jaringan sebagai kausal untuk hasil dari proses politik dipengaruhi oleh pola pertukaran antar aktor politik. Misalnya, sejauh mana terdapat inti-pinggiran (*core-periphery*) yang kuat, (Christopoulos dan Ingold 2015). Pemerintahan sebagai produk pertukaran politik dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara agen politik (Jones et al., 1997) dan (Robins et al., 2011) sebut keterikatan pemerintahan (*embeddedness*). Dengan kata lain, sebagai produk pertukaran politik, cara pemangku kepentingan berinteraksi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dapat menentukan sejauh mana kebijakan yang dihasilkan efektif, inklusif, dan dapat diterima oleh

ihak yang terlibat.



Salah satu kebijakan publik yang menjadi tantangan besar adalah masalah pembangunan sumber daya manusia. Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI) berdasarkan Riset Bank dunia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia adalah 0,53 tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara. HCI pada dasarnya adalah ukuran bagaimana kondisi pengetahuan, keterampilan dan kesehatan untuk dapat mendukung produktivitas SDM.

Mengingat pentingnya aspek kesehatan bagi pembangunan Sumber Daya Manusia menyebabkan permasalahan *stunting* menjadi salah satu masalah pada aspek kesehatan yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan Sumber Daya manusia yang berkualitas. Menurut World Health Organization (WHO), *stunting* adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai.

Tabel I.1 Prevalensi Stunting di Indonesia

Tahun	Prevalensi Stunting
2016	27,54 %
2017	29,6 %
2018	30,8 %
2019	27,67%
2020	26,92%
2021	24,40%

Sumber : Badan Pusat Statistik



Berdasarkan data tahun 2019 pada tabel I.1, prevalensi *stunting* yang berada pada angka 27,67%. Artinya, sekitar satu dari empat anak balita (lebih dari delapan juta anak) di Indonesia mengalami *stunting*. Pada tahun 2020 prevalensi *stunting* mengalami penurunan sebanyak 1,6 % dan berada pada angka 26,1%. Pada tahun 2021 juga terjadi penurunan dan berada pada angka 24, 4%. Angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%.

Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi *stunting* Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. Indonesia juga merupakan negara yang tertinggi kedua di Asia Tenggara dengan prevalensi anak penderita *stunting* usia dibawah lima tahun (balita) sebesar 31,8% tahun 2020 berdasarkan data Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah *stunting* melalui kebijakan, regulasi dan berbagai intervensi. Salah satunya adalah kebijakan intervensi penurunan *stunting* yang merupakan tanggung jawab bersama antar lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja.

Dasar hukum Intervensi Penurunan *stunting* terintegrasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Dalam rangka



mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, penanggulangan *stunting* di Indonesia diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres tersebut diterbitkan untuk mengganti Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, karena belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018 yang merupakan langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan penurunan *stunting* di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada November 2018 menerbitkan pedoman bagi Kabupaten/ kota dalam melaksanakan 8 aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pada Juni 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) juga menerbitkan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota yang berisi aksi integrasi intervensi



an *stunting* yaitu aksi pertama, analisis situasi program penurunan
Aksi kedua, penyusunan rencana kegiatan dan aksi ketiga,

Rembuk *Stunting*. Aksi keempat, peraturan Bupati/walikota tentang peran desa. Aksi Kelima, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Aksi Keenam, sistem manajemen data. Aksi Ketujuh, pengukuran dan publikasi *stunting*, dan Aksi kedelapan review kinerja tahunan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan *stunting* di Indonesia saat ini terkait dengan belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dan pemantauan dan evaluasi. Belum efektif dan efisienya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program. Masih minimnya advokasi, kampanye dan diseminasi terkait *stunting*, dan berbagai upaya pencegahannya.

Tabel I.2 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bulukumba

Tahun	Prevalensi Stunting di Bulukumba
2018	36,20%
2019	28,24%
2020	29,64%
2021	30,80%
2022	28,40%
2023	33,70%



Berdasarkan Tabel I.2 Bulukumba merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi selatan dengan prevalensi *stunting*

sebesar 36,2 % berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018. Bulukumba berada pada urutan ke 11 sebagai Kabupaten dengan prevalensi angka *stunting* tinggi dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.

Tabel I.3 Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Bulukumba

Tahun	Jumlah Balita	Balita Pendek	Balita Sangat Pendek	Jumlah Balita Stunting
2021	26.351	1.543	520	2.063
2022	25.261	1.304	437	1.741
2023	26.358	1.047	376	1.423

Adapun jumlah balita stunting di kabupaten bulukumba berdasarkan tabel I.3 setiap tahun mengalami penurunan. Tahun 2021 sebanyak 2.063 balita stunting, tahun 2022 sebanyak 1.741 kasus dan tahun 2023 sebanyak 1.423.

Berbagai kebijakan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *stunting* di kabupaten Bulukumba diantaranya menggelar workshop konvergensi percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada Desember 2019 dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program perbaikan gizi masyarakat melalui berbagai intervensi oleh Dinas Kesehatan. Pemerintah Kabupaten

ibu juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Enrekang dalam Studi Tiru *Stunting* yang diwakili oleh Bappeda, Dinas Kesehatan,



Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Ketahanan Pangan dan Diknas serta 28 Desa Lokus *Stunting* Kabupaten Bulukumba pada November 2020. Namun berbagai upaya tersebut masih belum efektif untuk menanggulangi angka *stunting* yang menyentuh angka 30, 8 persen di Tahun 2021 atau ada sebanyak 2063 kasus yang tersebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan data Dinas kesehatan kabupaten Bulukumba. Angka tersebut sangat tinggi untuk ukuran standar yang diberlakukan oleh WHO (*World Health Organisation*) yakni kurang dari 20 %. Oleh karena itu Bulukumba menjadi salah satu lokus penanganan *stunting* dari 17 daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi prioritas dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting*.

Program Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan tanggung jawab bersama antar lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. hal tersebut yang mendasari dibentuknya tim percepatan penurunan *stunting* dengan tujuan mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor. Tim tersebut terdiri atas Bupati Bulukumba sebagai tim pengarah, pada pelaksana terdiri atas Wakil Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Pengendalian Penduduk,

a Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, kesehatan, Kepala Bidang keluarga Berencana, ketahanan dan



Kesejahteraan Keluarga, ketua Stikes Panrita Husada, dan Tim Penggerak PKK. Total keseluruhan tim percepatan penurunan stunting adalah sebanyak 58 orang yang tersebar di berbagai OPD.

Tujuan pembentukan tim dalam intervensi penurunan *stunting* adalah untuk memastikan setiap institusi memahami peran dan kontribusinya dalam penurunan *stunting* dan membangun mekanisme koordinasi antar insitusi agar terselenggaranya intervensi penurunan stunting. oleh karena itu pelibatan berbagai aktor atau instansi yang saling berinteraksi akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program percepatan penurunan stunting.

Penelitian ini dapat didefinisikan bahwa untuk mencapai governance network yang efektif adalah dengan memperhatikan pola hubungan antar aktor dalam jaringan. Dalam konteks penurunan stunting dengan kompleksitas masalah yang yang melibatkan banyak faktor seperti nutrisi, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dll, pendekatan ini dapat membantu mengoordinasikan upaya dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan yang sama untuk menangani masalah stunting.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Governance Network dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Bulukumba”***.



1.2 Rumusan masalah

Pada dasarnya kebijakan percepatan penurunan stunting dirancang dengan tujuan untuk menurunkan angka stunting melalui delapan aksi yang dilakukan dengan melibatkan kerjasama multiaktor. Beberapa sektor penting diluar sektor kesehatan yang harus dilibatkan antara lain bantuan sosial, pendidikan, pembangunan ekonomi, lingkungan,dll. Pada praktek pelaksanaannya dibutuhkan interaksi antar aktor dalam kebijakan penanganan stunting. Efektif tidaknya tim percepatan penurunan stunting tersebut dapat dianalisis dengan melihat sejauh mana kualitas interaksi antar aktor yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola hubungan jaringan pada program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bulukumba ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pola hubungan jaringan pada program percepatan penurunan stunting di kabupaten Bulukumba

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis



Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan atau informasi dalam mengkaji pola hubungan jaringan pada program penanggulangan stunting di Kabupaten Bulukumba

sehingga dapat berguna bagi pengembangan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

2. Praktis

Dari segi praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam jaringan implementasi kebijakan penurunan *stunting* agar stakeholder lintas sektor dapat optimal dalam menjalankan program.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Governance

2.1.1 Pengertian Governance

Governance merupakan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses penentuan dan implementasi kebijakan publik. Pemerintah telah menunjukkan bahwa ia bukan lagi pemain utama dalam kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diidentifikasi oleh paradigma klasik administrasi publik.

Governance mengacu pada berbagai cara, mekanisme, dan proses yang digunakan oleh individu, perusahaan, organisasi, masyarakat, negara, dan bentuk organisasi supranasional dalam mengambil dan melaksanakan keputusan. Governance dalam pengertian abstrak ini menggambarkan pola aturan dan mekanisme koordinasi sosial dan pengambilan keputusan di mana sekelompok aktor mengatur isu dan kepentingan kolektifnya.

Chhooatray dan Stoker (2009) mendefinisikan *Governance is about the rules of collective decision-making in setting where there are a plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate*

is of the relationship between these actors and organizations.

nce adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam ran di mana terdapat pluralitas aktor atau organisasi dan di mana



tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi ini. (Vasudh & Gerry, 2009)

Governance mencakup keterlibatan semua komponen bangsa, mulai dari individu, kelompok, asosiasi sampai pada tingkat lembaga. Pendekatan governance berfokus pada pelibatan warga negara, kelompok, dan organisasi yang dikonstruksi dari realitas antar subyektif dengan berbagi pengalaman dan perhatian. (Jun, 2002) menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) tujuan utama governance, yaitu :

1. *To share the power in community decision-making and*
2. *To encourage not only autonomy and independence in local citizens, but also to provide the process to developing the common good through civic engagement.*

2.1.2 Dimensi Governance

Empat dimensi governance (Vasudh & Gerry, 2009), yaitu :

1. *Articulating a common set of priorities for societies*

Tugas pertama dan utama *governance* adalah artikulasi serangkaian prioritas dan tujuan bagi masyarakat yang telah disetujui bersama oleh masyarakat. Serangkaian tujuan ini memberikan tempat utama bagi pemerintah dalam *governance*. *Governance* merujuk pada



me dan proses melalui suatu konsensus, atau minimal suatu an mayoritas yang muncul dalam masyarakat. Artikulasi aian prioritas dan tujuan merupakan tugas yang sangat berat,

sehingga tidak ada suatu lembaga yang dapat melakukannya kecuali governance. Lembaga pasar misalnya, menyediakan mekanisme pertukaran tetapi semua faktor-faktor pendukung telah tersedia. Demikian juga jaringan antar organisasi memiliki tujuan bersama diantara para anggota tetapi tidak memiliki kemampuan menyusun tujuan yang lebih luas.

2. Coherence

Setelah tujuan diartikulasikan dengan jelas, tujuan tujuan tersebut perlu konsisten dan dikoordinasikan. Tujuan ini mungkin dapat disampaikan kepada level terendah melalui proses yang tidak koheren dan tidak terkoordinasikan ke seluruh sektor-sektor kebijakan, tetapi hal ini tidak efisien dan biaya yang sangat besar. Jika warga negara percaya bahwa institusi pemerintahan tidak mampu bertanggungjawab, mereka akan cenderung kehilangan kepercayaan dalam dirinya, kemudian menemui kesulitan dalam pemerintahan (governing). Kewenangan dan legitimasi yang ada membuat pemerintahan melalui instrumen yang relatif tidak mahal seperti informasi yang lebih memungkinkan daripada mempertahankan kepercayaan yang merupakan tujuan penting bagi institusi berkepentingan.



Jaringan dan pasar merupakan bentuk-bentuk alternatif force pada umumnya, bukan utama mampu menciptakan terutamanya kepada semua area kebijakan yang luas. Dalam konteks

tersebut, pemerintah perlu menciptakan koherensi guna menyediakan suatu visi yang luas dan menyeimbangkan seluruh kepentingan yang ada. Pemerintah dalam pelaksanaan aktivitas ini hanyalah sebagai alternatif (Pierre & Peters, 2005)

3. *Steering* (pengendalian)

Setelah tujuan telah disepakati, maka perlu mengendalikan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Sarana-sarana kebijakan konvensional yang digunakan pemerintah untuk pengendalian masyarakat adalah menggunakan regulasi, penyediaan langsung, dan subsidi. Salamon menegaskan bahwa dengan berubahnya pola-pola pengendalian dan implementasi kebijakan maka instrumen-instrumen yang digunakan perlu mencakup sejumlah hubungan hubungan kerja dengan aktor-aktor sektor privat.

4. *Accountability*

Akuntabilitas mempertanyakan kemampuan aktor atau pejabat publik menyelenggarakan pemerintahan kepada masyarakat. (Pierre & Peters, 2005) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah sangat penting bagi governance yang demokratis. Tanpa sarana akuntabilitas yang ditetapkan dengan tegas dan berfungsi dengan baik, demokrasi dapat

umi kesulitan-kesulitan dalam memelihara komitmennya terhadap



(Pierre & Peters, 2005) menegaskan bahwa pemerintahan kontemporer mempunyai setumpuk masalah dalam implementasi akuntabilitas. Namun demikian, konsep akuntabilitas ini masih mempunyai akar yang dalam pada sektor publik. Hal ini disebabkan oleh aktor-aktor nonpemerintah dan sektor privat yang terlibat dalam proses governance cenderung mempunyai sedikit atau tidak mempunyai konsep tentang akuntabilitas.

2.2 Governance Network

Jaringan (networks) adalah sebuah instrument menggabungkan beberapa aktor untuk bekerja bersama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Klijn & Koppenjan, 2016)

Governance network dikonseptualisasikan dalam berbagai cara, sebagian besar definisi memiliki karakteristik umum tertentu:

- 1) Jaringan dicirikan oleh masalah kebijakan yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, tetapi memerlukan tindakan kolektif dari beberapa aktor (Agranoff & McGuire, 2003; Koppenjan, 2004; M. Mandell, 2001)
- 2) Jaringan memiliki saling ketergantungan yang relatif tinggi antara aktor karena sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah dimiliki oleh aktor yang berbeda (Hanf & Scharpf, 1978)



tingginya ketergantungan ini menyebabkan tingkat kompleksitas strategis yang tinggi dan rangkaian tindakan (inter) yang tidak dapat diprediksi

(Hanf & Scharpf, 1978; M. P. Mandell, 1990; Sørensen & Torfing, 2007) karena tindakan satu aktor memengaruhi kepentingan dan strategi aktor lainnya.

- 4) Jaringan memiliki interaksi yang kompleks karena masing-masing aktor bersifat otonom dan memiliki persepsi sendiri tentang masalah, solusi, dan strategi (Agranoff & McGuire, 2003; Hanf & Scharpf, 1978; McGuire & Agranoff, 2011) Hal ini menyebabkan perbedaan substansial dalam persepsi, konflik nilai, dan ketidaksepakatan tentang kebijakan yang akan diterapkan dan layanan yang akan diberikan.
- 5) Interaksi jaringan menunjukkan beberapa daya tahan dari waktu ke waktu (Agranoff & McGuire, 2003; Laumann & Knoke, 1987)



(Jones et al., 1997) mengatakan bahwa berbagai ilmuwan memberikan definisi jaringan pemerintahan dengan istilah yang berbeda, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Definisi jaringan

Referensi	Istilah	Definisi Jaringan Pemerintahan
Alter & Hage, 1993	Jaringan Interorganisasional	Kelompok organisasi yang tak terbatas atau dibatasi, yang menurut definisinya adalah kolektif nonhierarkis dari unit yang terpisah secara hukum
Dubini & Aldrich, 1991	Jaringan	Pola hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi
Kreiner & Schultz, 1993	Jaringan	Kolaborasi interorganisasional informal
Larson, 1992	Bentuk Jaringan Organisasi	Pertukaran berulang jangka panjang yang menciptakan saling ketergantungan bertumpu pada terjeratnya kewajiban, harapan, reputasi, dan kepentingan bersama.
Liebeskind, Oliver, Zucker, & Brewer, 1996	Jaringan Sosial	Kolektifitas individu di antaranya pertukaran berlangsung yang didukung hanya oleh norma-norma perilaku yang dapat dipercaya
Miles & Snow, 1986, 1992	Jaringan Organisasi	Kelompok perusahaan atau unit khusus dikordinasikan oleh mekanisme pasar
Powell, 1990	Bentuk dari Jaringan	Pola pertukaran lateral atau horizontal, arus sumber daya independen, jalur komunikasi timbal balik

Governance Network adalah hubungan interdependensi para aktor yang memiliki kewenangan (autonomy) pada sektor publik, privat, dan ang berkerja bersama dalam pencapaian tujuan dari organsasi



2.3 Governance Network in Politic

Governance network in politic didefinisikan mencakup semua informasi yang berkaitan dengan hubungan antara aktor politik karena mereka terkait dengan hasil politik. (Christopoulos, 2017)

Dalam istilah yang lebih sederhana, *governance network* adalah sekelompok organisasi atau individu yang bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya dalam bidang kebijakan tertentu, seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau kebijakan lingkungan. Para pelaku ini terhubung melalui ketergantungan mereka satu sama lain dalam hal sumber daya, dan mereka berinteraksi satu sama lain melalui serangkaian aturan, norma, dan strategi.

Definisi Christopoulos menyoroti pentingnya memahami *governance network* sebagai sistem hubungan yang kompleks antar aktor, bukan sekedar kumpulan organisasi atau institusi individual. Hubungan antara aktor berperan penting karena mencerminkan adanya hal-hal yang tidak berwujud seperti reputasi dan kekuasaan sementara sering juga mencerminkan pertukaran transfer sumber daya yang nyata. Himpunan hubungan ini (yaitu jaringan) bertindak sebagai saluran untuk kekuasaan agen. Dan kekuasaan disalurkan untuk pencapaian hasil pemerintahan.

Sejak jaringan mencerminkan kekuatan agen, dan karena pelaksanaan an mereka yang menghasilkan hasil pemerintahan, studi jaringan sangat diperlukan untuk memahami pemerintahan politik. Ilmu radisional membuat asumsi penyederhanaan bahwa saling



ketergantungan aktor dapat ditangkap sebagai atribut aktor. Analisis jaringan menjadikan saling ketergantungan aktor sebagai titik tolak. Dalam hal itu, dampak aktor pada hasil dimediasi oleh pola interaksi antara orang lain. pola interaksi ini menciptakan struktur sosial-politik yang seringkali berada di luar pengaruh langsung agen individu. (Hollstein et al., 2017)

Definisi Christopoulos tentang governance network menekankan pentingnya pemahaman hubungan antar aktor, aturan dan norma yang mengatur interaksi mereka dan dinamika kekuasaan yang membentuk proses pengambilan keputusan. Pemerintahan sebagai sebuah proses dipengaruhi oleh bagaimana aktor-aktor ini berinteraksi dan sejauh mana terdapat struktur inti-pinggiran (core-periphery) dalam jaringan tersebut (Christopoulos & Ingold, 2015). Struktur inti-pinggiran mengacu pada adanya aktor-aktor yang memiliki pengaruh sentral (inti) dan aktor lain yang lebih berada di pinggiran, dengan akses atau pengaruh yang lebih terbatas. kualitas dari interaksi antara agen-agen politik juga penting dalam membentuk hasil pemerintahan. Kualitas ini disebut sebagai keterikatan pemerintahan (embeddedness), yang mengacu pada sejauh mana hubungan antara aktor-aktor ini mendalam dan terintegrasi dalam jaringan sosial dan institusi yang ada. Keterikatan ini memengaruhi kemampuan aktor untuk bekerja sama, membuat keputusan bersama, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam proses pemerintahan. (Jones et al., 2011).



2.3.1 Pola Hubungan Jaringan

2.3.1.1 Identifikasi Aktor (Core- Periphery)

Analisis kebijakan adalah untuk menjelaskan proses pencapaian hasil kebijakan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, analisis kebijakan mencoba memperhitungkan semua jalur berbeda yang mempengaruhi hasil kebijakan. Salah satunya adalah menyangkut identifikasi aktor kunci yang memiliki dampak signifikan pada pengambilan keputusan. (Christopoulos & Ingold, 2015)

Identifikasi aktor kunci dilakukan dengan menggunakan konsep Core-Periphery (inti-pinggiran). Konsep inti-pinggiran dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Prebisch dalam kerangka Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin (ECLA; khususnya Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL). Prebisch mulai menggunakan terminologi “inti” dan “pinggiran” pada tahun 1929. Ia menggambarkan gagasan-gagasan ini sebagai dua kategori regional yang luas dan kontras, yaitu, pusat yang maju secara ekonomi dan pinggiran yang belum berkembang.

Versi Friedmann dari model inti-pinggiran mencakup penjelasan mengapa beberapa daerah dalam kota menikmati kemakmuran yang cukup besar atau didefinisikan sebagai area yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk membangkitkan dan melakukan perubahan inovatif, sementara yang lain menunjukkan tanda-tanda kekurangan dan



kemiskinan perkotaan, bahkan ketika daerah perkotaan, secara umum, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan daerah pedesaan pinggiran.

Teori *core periphery* (inti-pinggiran) menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara Inti (*core*) dan pinggiran (*periphery*). Pusat-pusat ekonomi (inti) mendominasi daerah pinggiran tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik dan budaya. Inti, yang biasanya merupakan daerah metropolitan, berkontribusi pada pengembangan pinggiran bahkan ketika, pada saat yang sama, ia mensubordinasikannya dalam dimensi sosial dan ekonomi. Pusat-pusat biasanya memiliki potensi tinggi untuk inovasi (perbaikan) dan pertumbuhan, yang membentuk difusi inovasi secara geografis. (Rogers, 1962) Pada saat yang sama, menurut Friedmann, wilayah pinggiran mengalami pertumbuhan yang lambat atau bahkan stagnasi dan mungkin bergantung pada pertumbuhan yang didorong terutama oleh permintaan sumber daya di wilayah inti. (Klimczuk et al., 2019)

2.3.1.2 Kualitas Interaksi Jaringan (*Embeddedness*)

Menurut granovetter *embeddedness* merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktor individual sendiri tetapi juga mencakup perilaku yang lebih



perti penetapan harga dan institusi-institusi ekonomi yang lebih
perti penetapan harga dan institusi ekonomi, yang semuanya
am dalam suatu jaringan sosial. (Granovetter, 1985)

Granovetter (1990) dalam *The Old And New Economic Sociology*, membedakan dua bentuk keterlekatan, yaitu:

- 1) keterikatan struktural sebagai sejauh mana anggota pasangan berbagi mitra dan mitra itu sendiri terhubung satu sama lain. Keterlekatan struktural adalah keterlekatan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang lebih luas, bisa merupakan institusi atau struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu pola hubungan atau interaksi yang terorganisir dalam suatu ruang sosial.
- 2) Keterikatan relasional mengacu pada hubungan yang kuat dalam pasangan mitra jaringan, di mana mitra jaringan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan satu sama lain.

Teori *embeddedness* Granovetter menekankan pentingnya hubungan sosial dan jaringan interpersonal dalam membentuk kegiatan ekonomi dan sosial. Jaringan sosial dapat memberikan akses ke informasi, sumber daya, dan peluang yang tidak tersedia melalui sumber-sumber formal. Dengan memahami dan memanfaatkan hubungan ini, individu dan organisasi dapat memperoleh keuntungan kompetitif dan membangun interaksi yang saling menguntungkan dalam konteks ekonomi dan sosial.

Granovetter menjelaskan bahwa sebuah keterlekatan dapat rikan tertambat kuat (*over embedded*) atau lemah (*under ed*). Keterlekatandapat dikatakan kuat apabila terjadi interaksi



antara individu atau kelompok dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya keterlekatan dapat dikatakan lemah apabila tidak terjadi interaksi antar individu atau kelompok dalam kegiatan ekonomi.

Konsep keterlekatan Hesterley, dan Borgatti mengikuti karya Granovetter (1985, 1992). Hesterley, dan Borgatti menganalisis kondisi di mana *governance network* akan meningkatkan koordinasi dan mengurangi ketidakpastian perilaku, dengan memanfaatkan ekonomi biaya transaksi dan teori jaringan sosial. Hesterley, dan Borgatti mengidentifikasi keterikatan (*embeddedness*) struktural sebagai landasan bagi mekanisme sosial yang menopang jaringan pemerintahan yang efektif. (Jones et al., 1997)

Menurut Jones sistem jaringan pemerintahan (*governance network*) yang efektif akan membutuhkan kehadiran atau munculnya setidaknya hal-hal berikut:

1. struktur jaringan yang dapat memfasilitasi koordinasi tindakan yang efektif , mendukung pengembangan kepercayaan dan kolaborasi seperti tim;
2. kesepakatan luas di antara pelaku jaringan tentang tujuan dan tindakan; dan
3. Tujuan dan tindakan spesifik yang memadai untuk mengatasi maksud yang lebih luas dari sistem governance.



Dimensi *embeddedness* (Keterlekatan)

1) Kepercayaan

Kepercayaan antara aktor-aktor dalam jaringan adalah faktor penting dalam menentukan seberapa efektif jaringan tersebut. Kepercayaan yang tinggi memfasilitasi kerjasama dan mengurangi risiko konflik.

2) Frekuensi

Frekuensi menyangkut seberapa sering aktor-aktor dalam jaringan bertukar informasi satu sama lain.

3) Norma

Norma menyangkut sejauh mana aktor-aktor dalam jaringan mematuhi norma, aturan, dan prosedur yang sama.

Keterikatan struktural (*structural embeddedness*) merujuk pada posisi atau konfigurasi relatif individu atau organisasi dalam jaringan sosial. Ini berkaitan dengan seberapa terhubung atau terintegrasinya aktor dengan aktor lainnya dalam jaringan.

2.4 Stunting

2.4.1 Pengertian Stunting

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan stunting sebagai gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi terutama pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam



waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Anak tergolong stunting apabila panjang dan tinggi badannya menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku.

2.4.2 Penyebab Stunting

Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Penurunan stunting untuk mengatasi penyebab secara langsung menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersediannya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat

tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi baik kekurangan kelebihan gizi. Untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan



prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaa, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, dan kapasitas untuk melaksanakan.

2.4.3 Dampak Stunting

Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta (15 %) kematian anak balita d dunia dan menyebabkan 55 juta Disability- Adjusted Life Years (Dalys) yaitu hilangnya masa hidup sehat setiap tahun.

Dampak stunting dalam jangka pendek menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Sedangkan dampak stunting dalam jangka panjang menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa.

2.4.4 Intervensi Penurunan Stunting

Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang up intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama tor, dipusat, daerah dan desa. Intervensi spesifik adalah kegiatan



yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Sedangkan intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting

2.4.5 Dasar Hukum Intervensi penurunan stunting

Landasan hukum terkait dengan intervensi penurunan stunting :

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c. Undang-undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut diterbitkan untuk mengganti Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, karena belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

2.4.6 Lima Pilar pencegahan Stunting

Strategi Nasional percepatan penurunan stunting adalah langkah langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.



Lima pilar pencegahan stunting yaitu :

omitmen dan visi kepemimpinan Nasional dan Daerah

2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku
3. Konvergensi, koordinasi , dan konsolidasi program Pusat, Daerah, dan Desa
4. Ketahanan pangan dan gizi
5. Pemantauan dan evaluasi

2.4.7 Delapan Aksi Intervensi Penurunan Stunting

1. Analisis situasi Program Penurunan Stunting

Analisis Situasi program pencegahan dan penurunan *stunting* adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting* dalam wilayah kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis Situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Hasil Analisis Situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1.000 HPK.

Tujuan Analisis Situasi adalah untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000

terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif.

enyusunan rencana kegiatan



Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah kabupaten/kota selanjutnya mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kegiatan bertujuan untuk:

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Analisis Situasi ke dalam :
 - a) Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK; dan
 - b) Kegiatan OPD untuk meningkatkan intervensi gizi terintegrasi, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan/satu tahun mendatang, baik yang memerlukan atau tidak memerlukan anggaran.
- 2) Memberikan acuan bagi Kabupaten/Kota untuk pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).

3. Menyelenggarakan Rembuk Stunting tingkat kabupaten/kota



Rembuk *Stunting* merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan

rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan *stunting* di lokasi fokus.

Materi utama yang akan disampaikan dalam kegiatan Rembuk *Stunting* adalah:

- a. Program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan, dan
- b. Komitmen Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

Rembuk *Stunting* bertujuan :

- a. Menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan *stunting* kabupaten/kota terintegrasi
- b. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi



- c. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota.

4. memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa.

Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli desa. Namun demikian, secara umum alokasi pendanaan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan *stunting* relatif masih sangat kecil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 pasal 37 telah mengamanatkan kewajiban Bupati/Walikota untuk menerbitkan peraturan terkait daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan kal berskala desa. Peraturan ini akan menjadi acuan pemerintah



desa dalam menetapkan peraturan desa terkait kewenangan tersebut sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari diterbitkannya peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting*.

Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa dapat menjadi dasar untuk:

- a. Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan *stunting*,
- b. Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung pencegahan dan penurunan *stunting*,
- c. Menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa,
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan *stunting* termasuk pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individual/pribadi,



- e. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa, dan
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan *stunting*

5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang ada di desa.

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa.

Tujuan pembinaan KPM adalah untuk memastikan mobilisasi KPM di seluruh desa di kabupaten/kota berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi:



- a. Penentuan tugas KPM dalam pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa.
- b. Pengidentifikasian ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan KPM.
- c. Pengembangan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM.
- d. Pensinergian kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya pencegahan dan penurunan *stunting*.

6. Sistem Manajemen data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota

Sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* adalah tatanan pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program/ atau kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

Sistem manajemen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan di kabupaten/kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta



tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi disesuaikan dengan kegiatan di setiap tingkatan pemerintahan.

- a. Di tingkat desa, data digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses perencanaan, penentuan sasaran program, pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja (*score card*);
- b. Di tingkat kecamatan, data digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa, penentuan target desa, dan pemantauan kemajuan kegiatan.
- c. Di tingkat kabupaten/kota, masing-masing OPD yang membidangi sektor yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan seperti dalam Analisis Situasi, Rembuk *Stunting*, melihat dan melakukan reviu capaian layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program.

Tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data *stunting* adalah untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penurunan *stunting*

ntegrasi. Tujuan khusus perbaikan sistem manajemen data untuk mastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi,



yaitu: Aksi pertama (Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*), Aksi kedua (Penyusunan Rencana Kegiatan), Aksi ketujuh (Pengukuran dan Publikasi *Stunting*) dan Aksi kedelapan (Reviu Kinerja).

Pengelola program di kabupaten/kota melalui Bappeda dapat menggunakan data pencegahan dan penurunan *stunting* untuk keperluan advokasi ke kepala daerah dan juga memenuhi fungsi pelaporan ke provinsi dan pusat. Tujuan aksi perbaikan sistem manajemen data bukan untuk membangun sistem manajemen data baru/khusus untuk *stunting* tetapi untuk memperkuat sistem-sistem yang sudah ada di OPD, guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data tentang intervensi *stunting* gizi terintegrasi.

7. Pengukuran dan Publikasi *Stunting*

Pengukuran dan publikasi *stunting* adalah upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak bawah lima tahun serta publikasi angka *stunting* digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan *stunting*. Tata cara pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.



Tujuan dari pengukuran dan publikasi *stunting* adalah:

- a. Mengetahui status gizi anak sesuai umur agar kabupaten/kota dapat:
 - 1) Memantau kemajuan tumbuh kembang anak secara berkala,
 - 2) Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak balita yang optimal, dan
 - 3) Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
- b. Mengukur prevalensi *stunting* di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/ kota secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai bahan untuk:
 - 1) Meningkatkan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya
 - 2) Memecahkan masalah dan memantau proses perencanaan di tingkat desa hingga kabupaten/ kota, dan
 - 3) Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.

8. Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.



Review Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir. Reviuw dilakukan untuk:

- a. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian *output* (target kinerja), capaian *outcome*, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian,
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja *output* dan *outcome*, dan
- c. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Kinerja dinyatakan dalam indikator hasil tiap Aksi Integrasi. Hasil review kinerja menjadi masukan dalam pelaksanaan Analisis Situasi (Aksi pertama) untuk penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi kedua) tahun berikutnya.

Tujuan Review Kinerja Tahunan adalah untuk :

- a. Mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*,
- b. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah disepakati pada Rembuk *Stunting*, dan

Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan



penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfiqar A Bhutta, dkk dalam judul penelitian *How countries can reduce child stunting at scale: lessons from exemplar countries* menunjukkan bahwa Negara-negara membuat kemajuan melalui intervensi dari dalam dan luar sektor kesehatan, kontribusinya sebanding dari sektor kesehatan dan gizi (40% dari perubahan) dan sektor lain (50%), yang sebelumnya disebut strategi khusus gizi dan sensitif. Perbaikan dalam pendidikan ibu, gizi ibu, perawatan ibu dan bayi baru lahir, dan pengurangan fertilitas/interval antar kehamilan yang berkurang merupakan kontributor kuat untuk perubahan. Peta jalan untuk mengurangi stunting anak dalam skala besar mencakup beberapa langkah yang terkait dengan diagnostik, konsultasi pemangku kepentingan, dan penerapan intervensi gizi langsung dan tidak langsung yang terkait dengan sektor kesehatan dan sektor nonkesehatan. (Bhutta et al., 2020)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh daniel dkk dalam Interactions of Factors Related to the Stunting Reduction Program in Indonesia: A Case Study in Ende District (Daniel et al., 2023) anggaran program dan kerja sama serta koordinasi antara pemangku gan merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam sistem.



Pendanaan yang cukup dan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dapat mengarah pada keberhasilan program penanggulangan stunting. Sehingga program pengurangan stunting di negara-negara berkembang harus dilihat secara holistik dan perbaikan harus dilakukan dalam semua aspek, termasuk keuangan, kelembagaan, lingkungan, teknis, dan sosial.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raymond elikplim kofinti, isaac Koomson, dkk dalam *Reducing children's malnutrition by increasing mothers' health insurance coverage: A focus on stunting and underweight across 32 sub-Saharan African countries* menunjukkan bahwa cakupan asuransi kesehatan ibu mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya sehingga mengurangi stunting pada anak dan berat badan kurang melalui pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan penyediaan diversifikasi pola makan kepada anak-anak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnama Riezky Putri Ersani dalam “Analisis governance network pada interaksi antaraktor tim penggerak dalam implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender” menunjukkan bahwa kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran yang terjalin antara empat



selaku tim penggerak, yakni Kementerian PPN/Bappenas, erian PPPA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam

Negeri. Interaksi yang terjadi antara aktor tim penggerak belum efektif. Terlebih, fluktuasi nilai ARG yang signifikan pada rentang tahun 2018-2021 mencerminkan bahwa koordinasi tim penggerak dalam menerapkan kebijakan PPRG perlu diperhatikan. Proses governance network pada jejaring tim penggerak belum memadai untuk mendorong potensi dan dampak dari kebijakan PPRG dalam mengakselerasi PUG dan mencapai kesetaraan gender. (Ersani, 2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yurista Permanasari dan kawan-kawan dalam *“tantangan implementasi konvergensi pada program pencegahan stunting di Kabupaten Prioritas”* menunjukkan belum optimalnya implementasi konvergensi pencegahan stunting. Hal ini disebabkan karena masih adanya ego sektoral pada masing-masing OPD karena masih belum optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang masih belum memahami secara menyeluruh mengenai program pencegahan stunting. Fungsi bappeda sebagai kordinator dalam konvergensi juga tidak optimal. Belum diperoleh juklak dan juknis dalam melaksanakan program saat penelitian sehingga daerah belum mengetahui langkah untuk melakukan kegiatan dan belum tersedia basis data yang sama yang diperlukan agar konvergen dalam hal sasaran program. (Permanasari et al., 2020)



Tabel II. 2 Komparasi Penelitian

N o	Penulis / Tahun	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	Zulfiqar A Bhutta, dkk (2020)	<i>How countries can reduce child stunting at scale: lessons from exemplar countries</i>	Negara-negara membuat kemajuan melalui intervensi dari dalam dan luar sektor kesehatan, dan gizi (40%) sektor lainnya (50%), yang sebelumnya disebut strategi khusus gizi dan sensitif. Peningkatan dalam pendidikan ibu, gizi ibu, perawatan ibu dan bayi baru lahir, dan pengurangan fertilitas/interval antarkehamilan yang berkurang merupakan kontributor kuat terhadap perubahan	Sama sama meneliti tentang stunting	Penelitian terdahulu fokus pada paduan tentang cara mempercepat penurunan stunting di lima negara menggunakan mix method. Sedangkan penelitian ini fokus pada pola hubungan aktor yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting.
2	Daniel, dkk (2023)	<i>Interactions of Factors Related to the Stunting Reduction Program in Indonesia: A Case Study in Ende District</i>	anggaran untuk program dan kerja sama serta koordinasi antara pemangku kepentingan merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam sistem. Lingkaran umpan balik antara 2 variabel ini juga paling menonjol dalam sistem, yang menunjukkan bahwa pendanaan yang cukup dan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dapat mengarah pada keberhasilan program penanggulangan stunting	Sama sama meneliti tentang stunting dalam	Penelitian terdahulu fokus pada kerjasama pemangku kepentingan dengan variabel kerjasama, kemampuan pemangku kepentingan, anggaran, dan sanitasi dalam bentuk digram lingkaran sebab akibat sedangkan penelitian ini fokus pada pola hubungan aktor yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting menggunakan analisis embeddednes atau keterlekatan
3	Raymond elikplim kofinti, isaac Koomson, dkk	<i>Reducing children's malnutrition by increasing mothers' health insurance coverage: A focus on stunting and underweight across 32 sub-Saharan African countries</i>	langganan asuransi kesehatan ibu mengurangi stunting dan berat badan kurang anak. Hasil ini kuat terhadap berbagai pendekatan untuk mengatasi endogenitas dan berbagai ukuran stunting dan berat badan kurang anak. Efek langganan asuransi kesehatan ibu terhadap stunting dan berat badan kurang lebih jelas di kalangan anak perempuan daripada anak laki-laki.	Sama sama meneliti tentang stunting	Penelitian terdahulu fokus pada hubungan antara langganan asuransi kesehatan ibu dan malnutrisi sebagai penyebab stunting sedangkan penelitian ini fokus pada pola hubungan aktor yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting
4	Yurista Perman asari dan kawan-kawan	<i>tantangan implementasi konvergensi pada program pencegahan stunting di Kabupaten Prioritas</i>	Tantangan konvergensi adalah masih adanya ego sektoral , belum optimalnya sosialisasi, kondisi demografi wilayah yang sulit, belum optimalnya fungsi Bappeda sebagai koordinator dalam konvergensi, belum diperolehnya juklak dan juknis dalam melaksanakan program belum adanya penyediaan basis data yang sama yang diperlukan	Sama sama meneliti tentang stunting	Penelitian terdahulu fokus pada tantangan kovergensi pencegahan stunting sedangkan penelitian ini fokus pada pola hubungan aktor yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting



2.6 Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir

